



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**STUDI KOMPARASI KONDISI SOSIAL EKONOMI DI PEMUKIMAN KUMUH
DAERAH TEPI PANTAI DAN DAERAH DATARAN
DI KOTAMADIA SEMARANG
(COMPARATIVE STUDY OF SOCIO ECONOMIC CONDITION IN SLUM ARRAS
AT COASTAL AND NON-COASTAL AREAS IN SEMARANG MUNICIPALITY)**

Oleh:

Dra. Tri Kadarwati, SU, dkk

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
1986/1987**

**DIBLAYAI OLEH PROYEK BERBAGAI BIDANG ILMU TAHUN 1986/1987
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

A. JUDUL PENELITIAN : STUDI KOMPARASI KONDISI SOSIAL EKONOMI DI PEMUKIMAN KUMUH DAERAH TEPI PANTAI DAN DAERAH DATARAN DI KOTAMADIA SEMARANG

B. KETUA PROYEK PENELITIAN:

1. Nama Lengkap : Dra. Tri Kadarwati, SU
2. Pangkat/Jabatan : IId/Lektor Madya
3. Pengalaman dalam Bidang Penelitian : Ilmu Administrasi Negara
4. Sedang Mengadakan Penelitian : Tidak
5. Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

C. SUSUNAN TIM PENELITI : 3 (tiga) orang

D. LOKASI PENELITIAN : Kotamadia Semarang


E. JANGKA WAKTU PENELITIAN: 1 (satu) tahun

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN : Rp 5.000.000,-

G. SUMBER DANA : BBI (Berbagai Bidang Ilmu)

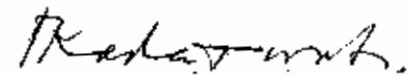
Semarang, 30 Januari 1997

Menyetujui:
Dekan Fakultas

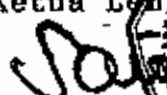

Drs. H. Abdulkahar
NIP 130 324 158



Ketua Tim Peneliti


Dra. Tri Kadarwati, SU
NIP 130 810131

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian


Dr. dr. Satrio
NIP 130 368 071



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Kata Pengantar	vi
Ringkasan Hasil Penelitian	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tinjauan Pustaka	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4.1. Tujuan Penelitian	11
1.4.2. Manfaat Penelitian	12
1.5. Kontribusi Penelitian	12
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1. Tipe Penelitian	12
1.6.2. Penentuan Lokasi Penelitian	13
1.6.3. Populasi Penelitian dan Teknik Sampling ..	13
1.6.4. Sumber Data	13
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data	14
1.6.6. Teknik Pengolahan Data	15
1.6.7. Teknik Analisis Data	15

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH TEPI PANTAI DAN DAERAH DATARAN KOTAHADIA SENARANG

2.1. Umum	17
2.1.1. Letak Geografis	17
2.1.2. Keadaan Demografi	18
2.1.3. Keadaan Sosial Ekonomi	25
2.2. Khusus	31

**BAB III KONDISI SOSIAL EKONOMI PEMUKIMAN KUMUH DI
DAERAH TEPI PANTAI DAN DAERAH DATARAN
KOTAMADIA SEMARANG**

3.1. Perumahan	38
3.2. Kebersihan dan Kesehatan	48
3.3. Pemilikan dan Penguasaan	58
3.4. Pendapatan dan Pengeluaran	62
3.5. Kegiatan Sosial	65
3.6. Adat Istiadat	66
3.7. Kegiatan Keluarga	70

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	78
4.2. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Daerah Tepi Pantai dan Daerah Dataran Kotamadia Semarang Tahun 1996	19
Tabel II.2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Tingkat Kepadatan Penduduk di daerah Tepi Pantai dan Daerah Dataran Kotamadia Semarang Tahun 1996	23
Tabel II.3. Sex Ratio di Daerah Tepi Pantai dan Daerah Dataran Kotamadia Semarang Tahun 1996	24
Tabel II.4. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Daerah Tepi Pantai dan Daerah Dataran Kotamadia Semarang Tahun 1996	26
Tabel II.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Perekonomian dan Sosial Budaya di Daerah Tepi Pantai dan Daerah Dataran Kotamadia Semarang Tahun 1996	28
Tabel II.6. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Daerah Tepi Pantai dan Daerah Dataran Kotamadia Semarang Tahun 1996	30
Tabel II.7. Komposisi Peneluk Agama di Daerah Tepi Pantai dan Daerah Dataran Kotamadia Semarang Tahun 1996	31

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt. karena berkat rahmat dan bimbingannya kami tim peneliti, berhasil menyelesaikan penelitian yang berjudul "Studi Komparasi Kondisi Sosial Ekonomi di Pemukiman Kumuh Daerah Tepi Pantai dan Daerah Dataran Di Kotamadia Semarang"

Penelitian ini berusaha membandingkan kenyataan-kenyataan yang dijumpai oleh tim peneliti di kedua wilayah peristiwa, yaitu di Kelurahan Tanjung Mas dan Kelurahan Pedurungan yang masing-masing mewakili daerah pantai dan daerah dataran.

Penelitian ini tidak mungkin berhasil terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu tim dengan memberikan informasi, bahan-bahan dan fasilitas-fasilitas yang amat diperlukan bagi pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian ini. Tidak mungkin bagi kami untuk menyebutkan satu persatu mereka yang telah mencurahkan tenaga dan waktu mereka yang berharga bagi kami. Beberapa dari yang kami sebutkan di bawah ini hanya beberapa diantaranya yaitu :

1. Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Semarang Utara
2. Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Pedurungan
3. Bapak Kepala Kelurahan Bandarharjo
4. Bapak Kepala Kelurahan Tanjung Mas
5. Bapak Kepala Kelurahan Muktiharjo Kidul
6. Bapak Kepala Kelurahan Tlogo Mulyo
7. Responden yang Menjadi obyek penelitian.

Sejujurnya kami sendiri penelitian ini masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu saran-saran dari para pembaca akan kami terima dengan senang hati, demi penyempurnaan penelitian kami ini, dan penelitian di masa yang akan datang.

Semarang, 30 Januari 1987

Tim Peneliti

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

STUDI KOMPARASI KONDISI SOSIAL EKONOMI DI PEMUKIMAN KUMUH DAERAH TEPI PANTAI DAN DAERAH DATARAN DI KOTAMADIA SEMARANG

Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan di Indonesia merupakan kenyataan menggenbirakan, karena berarti semakin banyak penduduk telah 'melek huruf', modern, inovatif, dan ketersediaan tenaga kerja murah. Segi positif peningkatan ini tidak sebanding dengan segi negatifnya. Lahan dan daya dukung kota yang relatif terbatas menimbulkan banyak masalah: 'over urbanization', spasial yang terbatas dan semakin sesak, kemacetan lalu lintas, berbagai ke-rawanan sosial dan munculnya masalah-masalah pertanahan.

Di dalam situasi demikian faktor kemiskinan memperparah masalah yang muncul, karena penduduk miskin perkotaan semakin tersingkir menjadi kelompok marjinal yang nyaris tidak bisa mendapatkan lahan untuk hidup di perkotaan. Akibatnya sebagian dari mereka terpaksa membangun rumah-rumah ilegal di bantaran sungai, tepi rel kereta api, di tanah-tanah kosong atau tidak jelas kepemilikan. Selain itu biasanya tidak dilengkapi fasilitas-fasilitas umum.

Muncullah kemudian pemukiman-pemukiman kumuh, yang identik dengan lingkungan kemiskinan, sehingga merupakan hambatan bagi tercapainya kehidupan sejahtera secara spirituil dan materiil. Cara mengatasi masalah ini harus dilakukan secara multidimensional sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya. ini.

Kekumuhan yang nampak di Kotamadia Semarang mencapai titik cukup parah di beberapa tempat, misalnya di Kecamatan Semarang Utara yang terletak di daerah pantai dan di Kecamatan Pedurungan yang terletak di daerah dataran, sehingga kedua lokasi ini terpilih sebagai sampel. Penentuan lokasi penelitian secara 'purposive'. Teknik pengambilan sampel (responden) dilakukan dengan 'random sampling', yang diambil di tiap kecamatan 50 kepala keluarga, sehingga seluruh responden adalah 100 kepala keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan membandingkan kondisi fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat kawasan kumuh di kedua wilayah penelitian dengan mengambil sampel sebanyak 100 kepala keluarga sebagai responden, melalui teknik observasi dan interview.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada masing-masing indikator dibawah ini : Sebagian responden mempunyai rumah sendiri., berdinding papan, berlantai tanah, namun sumber air lebih buruk di daerah pantai. Secara umum kondisi sosial ekonomi masih di bawah rata-rata. Kesadaran akan kebersihan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Responden di daerah pantai lebih tinggi tingkat kepemilikan terhadap barang. Mayoritas responden

berpenghasilan antara Rp. 100.000- Rp. 199.000, dengan jumlah pengeluaran relatif sama, namun lebih besar di daerah pantai. Peranserta dalam aktivitas sosial masih sangat tinggi, upacara-upacara adat masih terpelihara, namun sebagian responden tidak lagi mengikutinya. Ini mencerminkan pergeseran nilai pada masyarakat transisi. Kegiatan keluarga secara umum baik, dengan peran bapak yang lebih dominan pada pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang dianggap penting.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan sensus tahun 1990, jumlah penduduk perkotaan di Indonesia mencapai 55,4 juta jiwa, padahal pada tahun 1980 jumlah penduduk kota baru mencapai 32,85 juta jiwa atau 30% dari total penduduk seluruhnya, dengan demikian terjadi kenaikan sebesar 68,64%. Hasil studi NUDS 1985 menunjukkan bahwa penduduk perkotaan di Indonesia tahun 2000 diperkirakan akan mencapai 38% dari jumlah penduduk total (Firman, Kompas 29 Februari 1992).

Kenaikan pesat jumlah penduduk perkotaan sebagaimana dialami Indonesia, disatu pihak dapat dianggap sebagai hal yang menggembirakan, karena dengan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah perkotaan berarti semakin banyak penduduk yang telah 'melek huruf', modern, inovatif dan semakin mudah didapat tenaga kerja dengan harga yang murah. Akan tetapi dilain pihak pertambahan penduduk yang pesat bagi suatu kota yang hanya memiliki lahan dan daya dukung ruang yang relatif terbatas berakibat lain, diantaranya, 'over urbanization' (urbanisasi yang berlebih), spasial terbatas dan semakin sesak, banyak problem bermunculan, terutama masalah pertanahan. Banyak orang memburu tanah bukan sekedar untuk dijadikan tempat tinggal atau pemukiman, tetapi tanah seolah-olah menjadi semacam barang dagangan dan sumber rejeki yang sangat menguntungkan. Di daerah-daerah pusat industri, perdagangan, pemukiman elite atau daerah strategis lainnya, harga tanah

melonjak semakin tidak terkendali. Kompetisi yang bebas dimana semua pihak atau orang dapat terlibat dalam perdagangan tanah sering berakibat pelaksanaan rencana tata ruang perkotaan semakin sulit dilaksanakan. Kemampuan pemerintah dalam mengelola tanah kota, atau untuk membangun fasilitas publik menjadi semakin terbatas. Pemerintah bukan lagi menjadi penentu arah perkembangan dari pemanfaatan ruang kota, tetapi justru kekuatan komersial yang menjadi penentu, atau menjadi dominan dan banyak berhasil mempengaruhi kekuatan lembaga dalam menyusun kebijaksanaan pembangunan kota.

Di lain pihak faktor kemiskinan memperkuat permasalahan yang terjadi di daerah perkotaan, dimana kelompok marginal kota acapkali menjadi pihak yang sama sekali tidak diperhitungkan dalam pengaturan dan pembagian spasial tata ruang kota. Di wilayah perkotaan, kesempatan golongan miskin untuk memperoleh akses tanah umumnya cenderung semakin terbatas, bahkan dalam banyak hal nyaris tidak ada. Jutaan penduduk hidup berdesak-desakkan di ruang sempit, tanpa fasilitas umum yang memadai (air, listrik, kesehatan dan lain-lain), bahkan acapkali terancam dan menjadi korban penggusuran. Padahal penggusuran lingkungan kumuh tidak menyelesaikan kekumuhan, karena mereka akan pindah dan membuat daerah kumuh baru di tempat lain. Bila gejala ini dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan kampung-kampung kumuh, timbulnya kecemburuan dan keresahan sosial di kalangan masyarakat (Yudhusodu, Kompas 3 Juni 1991).

Adanya konsentrasi penduduk di kota akan dapat menyebabkan mencoloknya kesenjangan wajah kota. Konsentrasi penduduk juga

menyebabkan dekatnya lokasi si kaya dan si miskin. Akibatnya kalau ada gubug yang reot di kota akan lebih terlihat amat kumuh bila berdekatan dengan kawasan gedung bertingkat yang mentereng, karena masyarakat kota cenderung mengharapkan sesuatu yang indah dan teratur. Bila gubug-gubug tersebut berada jauh di daerah pedesaan atau persawahan hal tersebut dianggap wajar, bahkan dapat dianggap indah. Pengelompokan orang-orang dalam lingkungan kota yang padat bisa disebabkan adanya rasa senasib sepenanggungan, perasaan sama-sama atrata sosialnya. Segregasi tersebut dapat menimbulkan 'pulau-pulau' penduduk dengan ciri-ciri khas tertentu. Pengelompokan bersama-sama orang-orang miskin karena segregasi, akan menyebabkan kota terlihat kumuh, makin mempertebal identifikasi kelas, dan timbulnya masalah sosial atau kerawanan sosial lainnya.

Pemukiman di kota-kota besar di Indonesia tumbuh dari pemukiman-pemukiman atau kampung-kampung tua yang sudah ada di jaman Hindia-Belanda, atau dibangun di atas tanah-tanah negara, atau tanah-tanah milik bekas tuan tanah, atau dibangun secara liar disepanjang rel kereta api, sepanjang bantaran sungai atau tanah-tanah kosong yang tidak jelas diketahui pemilikan atau peruntukannya.

Pemukiman kumuh seringkali diidentikkan dengan lingkungan kemiskinan yang kurang memadai dalam memberikan prasyarat dan syarat-syarat kehidupan sehat yang sejahtera secara materiil maupun sprirituil. Berbagai bentuk penyimpangan sosial juga dikaitkan dengan pemukiman kumuh sebagai penyebab, bahkan lebih tragis seringkali dinilai sebagai pemukiman yang tidak kuat posisinya di tengah rancangan peta pembangunan tata

kota. Hal ini terjadi karena pemukiman kumuh kebanyakan merupakan komunitas masyarakat urban yang tidak memiliki tanda keabsahan sebagai warga kota. Kondisi pemukiman kumuh yang demikian mengundang perhatian dan keprihatinan berbagai pihak.

Kehadiran pemukiman kumuh di kota-kota besar menimbulkan berbagai persoalan yang tidak bisa dianggap mudah penyelesaiannya. Ir. Siswono Yudohusodo yang waktu itu masih menjabat sebagai Menpera melihat faktor kemiskinan, ketidaktahuan, serta sebab-sebab kultural/lingkungan budaya merupakan penyebab tumbuhnya hunian liar dan kumuh, maka dari itu pendekatan multi dimensional yang tepat harus digunakan dalam upaya penanggulangannya (Kompas, 3 Juni 1991).

Hal ini berarti penyelesaian kekumuhan harus didekati juga dari dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dan tidak hanya dari dimensi fisik, planologi dan sebagainya.

Kekumuhan dari pemukiman di daerah tepi pantai seperti yang terdapat di Kecamatan Semarang Utara dan di daerah dataran seperti terdapat di Kecamatan Pedurungan tampak lebih berat diderita oleh warganya daripada kekumuhan yang terdapat di daerah lain. Sebab utama dari keberatan beban kekumuhan tersebut diperkirakan karena tingkat kepadatan hunian sudah sedemikian tingginya sehingga tidak ada lagi lahan atau ruang kosong yang dapat digunakan untuk memulai penyegaran dari kekumuhan tersebut. Di samping itu juga karena terbatasnya sosial ekonomi, sosial budaya masyarakat yang bersangkutan sehingga tidak memungkinkan untuk dapat memperbaiki sendiri kondisinya.